

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendidikan

Berdasarkan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menurut UNESCO (1975) “*Education as organized and sustained communication designed to bring about learning*” (pendidikan adalah komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan belajar) (dalam Sudjana, 2010, hlm. 23).

Jadi, pendidikan merupakan usaha sadar dan terorganisir dan berkelanjutan dalam suasana belajar untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pendidikan yang ditekankan adalah proses yang tidak sekedar belajar untuk mengetahui sesuatu (*learning how to know*), melainkan belajar untuk memecahkan masalah (*learning how to solve problems*), dan yang paling penting adalah belajar untuk kemajuan kehidupan diri dan lingkungannya (*learning to live to be*).

Pendidikan terbagi atas 3 jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Coombs (1973), dalam Sudjana (2007), Adapun pendidikan formal yaitu kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, yang dimulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi termasuk didalamnya studi yang berorientasi pada akademisi dan umum, program spesialisasi, dan latihan

profesional yang dilakukan terus menerus. Pendidikan nonformal yaitu kegiatan yang terstruktur dan terorganisasi, di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri dan melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan sepanjang hayat sehingga memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari keluarga, lingkungan, tetangga, tempat bermain, perpustakaan, pasar, dan media masa.

Program SSG merupakan sebuah program pelatihan yang terstruktur dan terorganisir di luar sekolah. SSG termasuk pada jenis pendidikan nonformal yang konsen pada pendidikan karakter yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut menjadi solusi pelaksanaan pendidikan Kewarganegaraan pada pendidikan nonformal.

2.2 Pengertian Karakter

Budimansyah (2014) menyatakan karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil (dapat dibentuk) pada diri individu yang menjadi landasan penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi. Lebih luas lagi Marzuki, dkk (2011, hlm. 47) mengatakan bahwa,

Karakter identik dengan akhlak sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku karakter identik dengan yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Dari dua pendapat tersebut menggambarkan pengertian karakter sebagai sifat pribadi yang relatif stabil sebagai landasan perilaku berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat yang berlaku. Sama halnya dengan pendapat Marzuki, dkk (2011, hlm. 53) karakter atau akhlak merupakan hasil dari proses seseorang melaksanakan ajaran agamanya.

Kebijakan Nasional (2010, hlm. 7) karakter diartikan sebagai

“... nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri

dalam diri dan terjewantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa dan karsa seseorang atau kelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan”.

Hasanah (2012, hlm. 209) menambahkan bahwa karakter bangsa dapat dibangun dari nilai etika inti (*core ethical values*) yang bersumber dari nilai-nilai agama, falsafah negara dan budaya bangsa. Hal tersebut telah tertuang secara rinci dalam Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional 2010, ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter yaitu:

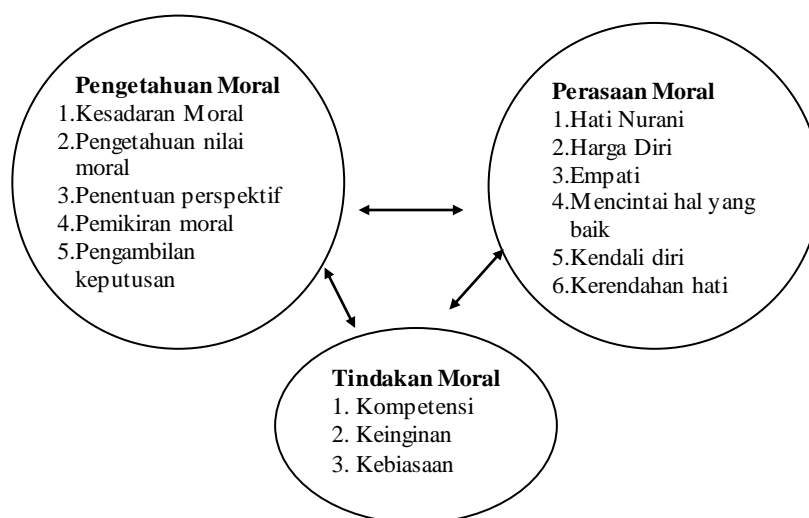
1. Relijius, Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur, Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi, Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
6. Kreatif, Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri, Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis, Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan, Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air, Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
12. Menghargai Prestasi, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. Cinta Damai, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. Gemar Membaca, Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Lickona (2012, hlm. 82) karakter memiliki tiga bagian yang saling berhubungan : pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik-kebiasaan dalam cara berfikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Lickona menekankan bahwasanya karakter meliputi cara berfikir, hati, dan tindakan yang sinkron secara benar tanpa manipulasi.

Bagan 1.1

Komponen Karakter yang Baik



Sumber : Buku *Educating for Character* (Lickona, 2012)

Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain menandakan saling berhubungannya antar ketiga domain tersebut. Pengetahuan moral dapat meningkatkan perasaan moral, perasaan moral akan menimbulkan tindakan moral yang baik dan berkarakter.

Lebih lanjut Lickona (2012, hlm. 16) membagi sepuluh esensi kebajikan sebagai bagian dari karakter kuat meliputi :

1. Kebijaksanaan (*wisdom*) yaitu penilaian yang baik, baik bagi kita dan baik untuk orang lain,
2. Keadilan (*justice*) yaitu menghormati hak-hak orang lain dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan,
3. Keberanian (*fortitude*) yaitu melakukan apa yang benar dalam kesulitan,
4. Pengendalian diri (*temperance*) yaitu kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri,
5. Cinta yaitu empati, kasih sayang, kebaikan, kedermawanan, pelayanan, loyalitas, patriotisme, dan memberikan maaf sebagai wujud rasa cinta,
6. Sikap positif yaitu harapan, antusiasme, fleksibilitas, dan rasa humor,
7. Bekerja keras mencakup inisiatif, ketekunan, penetapan tujuan, dan kecerdikan,
8. Integritas berarti mengikuti prinsip moral, yang setia pada kesadaran moral, menjaga kata-kata, dan berdiri pada apa yang kita percayai,
9. Syukur seperti cinta, bukanlah perasaan, melainkan tindakan kehendak,
10. Kerendahan hati, menurut pendidik David Isaacs, “adalah mengakui keduanya antara ketidakmampuan dan kemampuan kita, serta menekan kemampuan kita ke dalam pelayanan tanpa menarik perhatian atau mengharapkan tepuk tangan.

Kesepuluh esensi kebajikan ini akan sulit dimiliki seseorang secara keseluruhan, namun antara satu kebajikan akan mampu menarik munculnya kebajikan yang lain sebagai karakter pada diri seseorang. Lickona membagi karakter menjadi dua yaitu karakter baik dan karakter kuat. Karakter baik dengan tiga komponen pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral, sedangkan karakter kuat dibagi menjadi 10 kebajikan berupa tindakan.

Soewardi (2009, hlm. 82) menggambarkan ada empat sisi karakter manusia maupun bangsa di dunia secara umum dalam teori adab karsa.

Gambar : 2.1
Teori Adab Karsa

	KARSA KUAT (QADARIYAH)	KARSA LEMAH (ASY-ARIYAH)	
ADABTINGGI	A Nabi Muhammad s.a.w. Negara “Model” Madinah “FREEDOM IN SUBMISSIVENESS” Rapid Growth Persaudaraan dan Kekuatan	C Negara Berkembang “NO FREEDOM, ONLY SUBMISSIVENESS” No Growth	IBADAH
ADAB RENDAH	B Barat Sekuler (dan Macan Asia) “FREEDOM IN INSECURITY FEELING” Growth (tapi akhirnya “Crisis of Modern Science”) “Resah, Renggut, Rusak”	D Negara Berkembang “FREEDOM IN CHAOS” (Pelanggaran Normatif) Share Lapisan Atas: “Kuda Lepas Kandang” Lapisan Bawah : “Mobil Kurang Tenaga”	SELF INTEREST

Sumber : Buku Roda Berputar Dunia Bergulir (Soewardi, 2009)

Kotak A menggambarkan sebuah masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang berpondasikan pada “Persaudaraan dan Kekuatan”. Hubungan yang bersifat bebas antar manusia (*hablumminannas*) namun merupakan ketundukan kepada Tuhan (*hablumminallah*). Inilah bentuk empirikal masyarakat paling sempurna yang berdaya dorong jiwa *mutmainnah* atau ketenangan. Dan dengan pondasi kedua prinsip tersebut, meskipun baru 10

tahun, telah mengalami *rapit growth*, dan merupakan pelecut untuk terjadinya globalisasi pertama di dunia.

Kotak B ialah kotaknya masyarakat barat termasuk di dalamnya Macan Asia yang hanya memiliki “Kekuatan”. Adapun “Persaudaraan” telah berbalik dalam bentuk “Konflik”. Karena itu jiwa orang dari masyarakat ini dilandasi oleh amarah. Inilah masyarakat pelampiasan nafsu, yang akhirnya akan mencelakakan diri sendiri. Namun dengan kekuatannya, struktur kognisinya menjadi cerdas, dan dapat meraih kemajuan ilmiah yang “*spektakuler*”. Orang-orang dari masyarakat ini berlandaskan pada pandangan konflik, benar-benar menjadi mandiri, namun kemandirian yang bersifat “*insecure*”. Pertumbuhan atau *growth* diupayakan benar-benar, sehingga dalam keadaan konflik itu telah banyak kue yang bisa mereka bagi. Demikian kekuatan tanpa persaudaraan, akhirnya mereka sampai pada keadaan “*Crisis of Modern Science*” dan “Resah, Renggut, Rusak”.

Kotak C merupakan gambaran negara berkembang yang bercirikan adab yang tinggi namun Karsanya lemah. Hal ini merupakan gambaran masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan. Mempunyai “persaudaraan” yang tinggi namun tidak punya “Kekuatan” untuk melawan. Karena memang bangsa Indonesia pada saat itu dibodohi dengan tidak dididik.

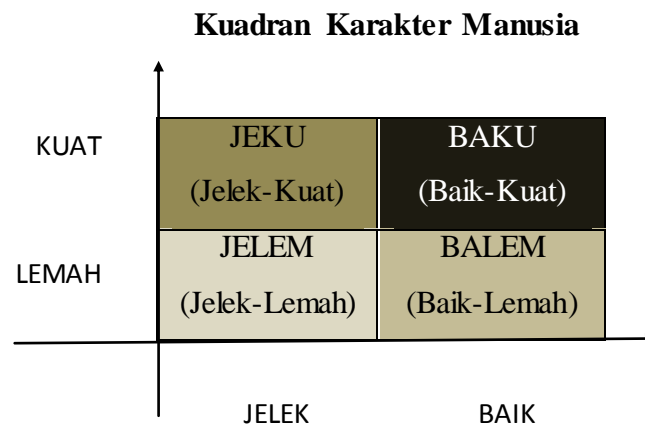
Kotak D , keadaannya lebih buruk dari kotak yang lain. Kotak ini tidak memiliki sama sekali dari “Persaudaraan” maupun “Kekuatan”. Karena itu sebutan yang pantas untuk masyarakat ini adalah “*Freedom of Chaos*”. Atau kebebasan yang bersifat kesemrawutan. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Jauh dari kata berkarakter. Yang kuat makan si lemah, dan menghalalkan segala cara, jiwa yang melandasinya adalah jiwa amarah. Adapun yang diutamakan dalam masyarakat ini adalah *share* atau pangsa dari kue yang dibagi. *Growth* tidak diutamakan. Bila ada *growth*, lapisan atas akan memperoleh lebih banyak dari lapisan bawah. Hal ini dicapainya dengan pelanggaran yang bersifat normatif, sosial, agama, dan perundang-undangan negara.

Negara Indonesia saat ini lebih memperlihatkan gambaran seperti kotak D. Negara berkembang yang kebablasan, jauh dari kata berkarakter. Hal ini jangan

sampai terus menerus terjadi. Kita perlu formulasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

Senada dengan konsep Lickona dan Adab Karsa Herman Soewardi, Aa' Gym (2013, hlm. 13) membagi 4 karakter yang ada pada diri manusia yaitu:

Gambar 2.2



Sumber : Buku Karakter Baku (Gymnastiar, 2013)

1. Baik dan lemah, yakni seseorang yang selalu jujur terpercaya, rendah hati, murah senyum, penyabar. Akan tetapi dia tidak memiliki kedisiplinan dan tidak memiliki keberanian yang cukup serta tidak memiliki ketangguhan. Dalam demikian, maka dia akan menjadi orang yang baik hanya untuk dirinya sendiri
2. Jelek dan lemah, ini adalah karakter yang paling rendah yakni orang yang berperangai jelek, licik, gemar berbohong dan munafik. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, dia tidak memiliki cukup keberanian untuk melakukan kejahatan. Pola hidupnya tidak disiplin dan gampang menyerah, takut membuat keputusan dan terlalu banyak perhitungan. Akhirnya ia tidak bisa banyak melakukan apa-apa. Kejelekannya hanya berdampak kepada dirinya sendiri.
3. Jelek dan kuat, ini adalah karakter yang paling membahayakan. Biasanya karena punya karakter inilah seseorang melakukan kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya. Cirinya munafik, musyrik, sombong, licik, pendengki dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan dia juga punya keberanian, kecerdasan, ulet, dan ambisius dalam melakukan kejahatannya. Orang yang berkarakter

seperti ini yang kemudian mengerogoti bangsa sehingga keropos dan rentan ambruk.

4. Baik dan kuat. Ini adalah karakter yang sangat kita butuhkan yaitu ikhlas, jujur, tawadhu, disiplin, berani dan tangguh. Karakter ini memiliki kesempurnaan dengan segala kemampuannya. Generasi yang seperti ini yang dinantikan bangsa ini agar dapat maju.

Sedikit perbedaan antara pembagian karakter baik dan karakter kuat menurut Lickona dan Gymnastiar. Lickona menjabarkan karakter kuat berupa sikap dan tindakan seseorang yang dijabarkan dalam 10 kebajikan esensi, sedangkan Gymnastiar menterjemahkan karakter kuat berupa aktifitas fisik yang tercermin dalam perbuatan berupa disiplin, berani, dan tangguh. Jika diterjemahkan lagi, antara kedua pemikiran tersebut mempunyai esensi yang sama dalam membagi karakter.

Nasrudin, dkk (2014) mengatakan bahwa jiwa manusia sebenarnya condong kepada kebaikan sebagai fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah yang terjemahnya:

“...tetapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci pada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 7-8).

Orang yang memiliki karakter baik menurut Petrides (dalam Saptono, 2011, hlm. 20) cirinya mereka tahu hal yang baik (*Knowing the good*), menginginkan hal yang baik (*desiring the good*), dan melakukan hal yang baik (*doing the good*). Karakter baik maupun buruk sebenarnya masing-masing telah ada dalam diri setiap individu, namun bagaimana karakter buruk itu dapat diminimalisir dan dibuang dan memunculkan karakter baik yang berlandaskan ketuhanan.

Karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang menjadi cerminan kepribadian yang tampak dari perbuatan, tingkah laku, dan bahasa yang digunakan berupa karakter BaKu (Baik dan Kuat) dengan Tauhid yang benar. Karakter tersebut dibentuk dalam program

Santri Siap Guna (SSG) Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung dalam tiga bulan latihan.

2.3 Strategi Pendidikan Karakter

2.3.1 Pendidikan Karakter di Lingkungan sekolah/lembaga pendidikan formal/non formal

Bagan 1.2



Sumber : Kebijakan nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010

Pendekatan yang digunakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam pengembangan pendidikan karakter, yaitu pertama melalui *Stream Top down*, kedua melalui *stream bottom up*, dan ketiga melalui *stream* revitalisasi program. Strategi yang dimaksud secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Intervensi melalui Kebijakan (*Top-Down*)

Jalur atau aliran pertama inisiatif lebih banyak diambil oleh pemerintah/kementerian pendidikan nasional dan didukung secara sinergis oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam strategi ini pemerintah menggunakan lima strategi yang dilakukan secara koheren, yaitu :

1. Sosialisasi, Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter pada lingkup/tingkat nasional, melakukan gerakan kolektif dan penancangan pendidikan karakter untuk semua.
2. Pengembangan regulasi, untuk terus mengakselerasikan dan membumikan gerakan nasional pendidikan karakter, Kementrian Pendidikan Nasional bergerak mengkonsolidasi diri di tingkat internal dengan melakukan upaya-upaya pengembangan regulasi untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan karakter.
3. Pengembangan kapasitas, Kementrian Pendidikan Nasional secara komprehensif dan masif akan melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter. Perlu disiapkan satu sistem pelatihan bagi para pemangku kepentingan pendidikan karakter yang akan menjadi pelaku terdepan dalam mengambangkan dan mensosialisasikan nilai-nilai karakter.
4. Implementasi dan kerjasama, Kemendiknas mensinergiskan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter di lingkup tugas pokok, fungsi, dan sasaran unit utama.
5. Monitoring dan evaluasi, secara konverhensif kemendiknas akan melakukan monitoring dan evaluasi terfokus pada tugas, pokok, dan fungsi serta sasaran masing-masing unit kerja baik di unit utama maupun dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Monitoring dan evaluasi sangat berperan dalam mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan karakter disetiap unit kerja.

2. Pengalaman Praktisi (*Bottom-Up*)

Pembangunan pada jalur/tingkat ini diharapkan dari inisiatif yang datang dari satuan pendidikan. Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada sekolah-

sekolah yang telah mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan ciri khas lingkungan sekolah tersebut.

3. Revitalisasi Program

Pada jalur/tingkat ketiga, merevitalisasi program – program kegiatan pendidikan karakter di mana pada umumnya banyak terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada dan syarat dengan nilai-nilai karakter.

Ada tiga poin yang disampaikan oleh Jamaluddin (2013) terkait pendidikan karakter dalam artikelnya bahwa, pertama istilah pendidikan karakter tidak dikenal secara konstitusi di Indonesia, yang ada dalam pembangunan pendidikan nasional adalah pendidikan akhlak, kedua pendidikan karakter dapat diperkuat dengan pendidikan nonformal di luar sekolah, ketiga pendidikan karakter juga harus diperkuat terutama dalam keluarga. Beliau menggambarkan bahwa pendidikan karakter sejatinya adalah pendidikan akhlak mulia yang harus melibatkan tiga komponen pendidikan secara utuh. Ada pelibatan semua pihak agar usaha pembentukan karakter bangsa dapat terwujud.

Muslich (2013) memberikan usulan beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah (*top-down*) untuk membangun karakter bangsa antara lain :

1. Menginternalisasikan pendidikan karakter pada instansi pendidikan semenjak tingkat dini atau kanak-kanak
2. Menanamkan sebuah koordinasi gerakan revitalisasi kebangsaan bersama generasi muda, yang diarahkan terutama pada penguatan ketahanan masyarakat dan bangsa terhadap upaya nihilisasi pihak luar terhadap nilai-nilai budaya positif bangsa Indonesia
3. Meningkatkan daya saing bangsa dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Menggunakan media masa sebagai penyalur upaya pembangunan karakter bangsa.

Peneliti melihat bahwa diklat SSG merupakan bagian dari strategi pendidikan karakter yang dibangun dari bawah dalam hal ini pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal. SSG berusaha membentuk karakter dari

masyarakat umum pada program regular terutama generasi muda dan berusaha untuk membangun sistem pendidikan karakter untuk lembaga atas pada program SSG nonregular. Dengan pergerakan pembangunan karakter umat ini yang kemudian berusaha menjadi bagian dari solusi membentuk jati diri bangsa Indonesia.

2.3.2 Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga

Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Semua memiliki peran tersendiri dalam keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga bertugas untuk membimbing keluarganya ke arah kebaikan dunia maupun akhirat. Menjadi kepala keluarga merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ibu sebagai pengurus rumah tangga agar senantiasa bersinergi dengan kepala keluarga (ayah) agar terbentuk keluarga yang ideal. Anak adalah bagian terpenting dari keluarga. Anak akan meneladani sikap yang diajarkan dan dimunculkan oleh orang tua mereka. Maka sebaiknya orang tua bisa menampilkan karakter yang baik dalam keluarga. Keluarga merupakan pembentuk utama karakter setiap individu. Setiap anak akan dididik orang tuasebagai guru pertamanya. Wening (2012, hlm. 55) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan nilai melalui keluarga, teman sebaya, dan media massa berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Maka dari itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada calon suami dan calon istri untuk mempersiapkan diri sebelum beranjak menuju pelaminan dan membentuk rumah tangga. Gymnastiar (2013, hlm. 134-156) hal yang harus diperhatikan dalam mendidik anak :

1. Didik Ketauhidannya
2. Didik Ibadahnya
3. Didik Akhlaknya
4. Didik Akal Pikirannya
5. Didik Fisiknya.

Lickona (2012, hlm. 49) mengatakan bahwa pengasuhan orang tua merupakan dasar pengukuran yang digunakan ketika seorang anak terlibat dalam

masalah hukum. Sebuah studi sederhana dilakukan terhadap ribuan anak SMP dan SMA, dan ditemukan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak-anaknya, semakin baik komunikasi yang terjadi antara anak dan ayah. Selain itu, semakin besar sikap kasih dan sayang antara anak dan kedua orang tuanya, semakin kecil kemungkinan anak-anak tersebut untuk terlibat dalam masalah pelanggaran hukum.

2.3.3 Pendidikan Karakter di Lingkungan Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu manusia tidak bisa hidup secara individualis. Secara sunatullah, dalam lingkungannya manusia merinteraksi satu sama lainnya. Individu, keluarga, dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka membentuk lingkungan yang berkarakter baik dan kuat pun perlu dilakukan.

Gymnastiar (2013) ada beberapa langkah dapat menjadi program lingkungan masyarakat untuk membentuk karakter baku, diantaranya:

1. Bangun kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid, membiasakan shalat berjamaah, menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas.
2. Bangun suasana kebersamaan, berupa kerja bakti yang sebenarnya sudah membudaya di masyarakat kita. Kerja bakti dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, tegur sapa, saling menjaga, dan membentuk suasana keakraban antar warga.
3. Hindari potensi perselisihan. Konflik adalah hal yang lumrah dalam kehidupan sosial. Perbedaan watak, kebiasaan atau latar belakang lainnya bisa memicu terjadinya konflik. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah meminimalisir konflik dengan menjauhi prasangka buruk, ghibah, atau perbuatan lain yang dapat memicu konflik. Jika terlanjur terjadi maka kedepankalah musyawarah untuk mencari jalan keluar bersama.

2.4 Pendidikan Kewarganegaraan

Winataputra (2004), Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas yakni sebagai wahana pendidikan yang dibangun untuk membina dan mengembangkan warga negara cerdas dan baik dalam latar subsistem pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal terdiri atas mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dan mata kuliah umum dalam kurikulum perguruan tinggi. Nonformal dalam bentuk program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau sejenisnya yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk informal berupa pemikiran individu dan kelompok pakar terkait.

Misi PKn menurut Al Muchtar (2011, hlm.1) yaitu untuk membangun watak warga negara yang beriman dan bertaqwa, dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya Budimansyah & Suryadi (2008, hlm. 68), kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar ; pertama, PKn secara kurikuler dirancang untuk mengembangkan potensi individu menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat saling berpenetrasi dan terintegrasi. Ketiga, secara programatik sebagai mata pelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aliyah (2015, hlm. 18) menyatakan bahwa PKn dikembangkan agar menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif, yakni manusia yang seluruh aspek pribadinya berkembang tidak hanya aspek kecerdasan kognitif, tetapi menyangkut ranah lainnya yaitu kecerdasan emosional dan spiritual.

Selanjutnya Budimansyah & Karim (2008, hlm. 21-22) menjelaskan bahwa yang dimaksud cerdas komprehensif atau insan kamil yaitu *pertama* insan yang memiliki kecerdasan spiritual, yaitu mampu mengaktualisasikan dirinya melalui olah hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan,

dan akhlak mulia. *Kedua* cerdas emosional yakni mengaktualisasikan dirinya melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitifitas dan apresiasifitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya. *Ketiga* cerdas sosial yakni mampu mengaktualisasikan diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik, simpatik, menjunjung hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan, dan berwawasan kebangsaan. *Keempat* cerdas intelektual yakni mampu mengaktualisasikan diri melalui olah fikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi serta kritis, kreatif, dan imajinatif. *Kelima* cerdas kinestetik yaitu kemampuan mengaktualisasikan diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Dengan PKn diharapkan warga negara menjadi insan yang memiliki nilai-nilai ketuhanan yang utuh dan bijaksana dalam setiap tindakan.

2.5 Pendidikan Karakter dalam PKn

Winataputra (2004), secara epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan domain pendidikan nilai dan karakter, secara aksiologi bertujuan untuk pembangunan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat ditujukan agar semua elemen anggota masyarakat secara individu dapat mengetahui, mengerti, memahami dan melaksanakan tata krama, tertib dan bertindak sesuai dengan norma kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (ananda, 2011, hlm. 261).

Secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam melakukan penguatan nilai-nilai yang dijadikan sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Murdiono dkk, 2014, hlm. 149). Hal tersebut dapat dilakukan melalui intervensi dalam kegiatan kurikuler maupun dalam proses habituasi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

Untuk dapat melaksanakan misi tersebut maka pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat agar menjadi *powerfull learning area*, yakni bermakna (*meaning full*), terintegrasi (*integrated*, berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Harus ada keterlibatan berbagai sektor dalam melaksanakan misi ini agar tercapai secara maksimal. Perlu adanya pembagian peran dari lembaga pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Desain induk Pendidikan Karakter (Kemdiknas, 2010, hlm. 11) menjelaskan bahwa lingkup pendidikan karakter mulai dari satuan pendidikan berupa kegiatan kurikuler dalam Pendidikan Kewarganegaraan, kegiatan ekstrakurikuler berupa Pramuka, Rohis (rohani keislaman), PMR, dan lain-lain. Namun Pendidikan karakter dalam lingkup keluarga dan masyarakat masih kurang tersentuh.

Gambar 2.3
Desain Induk Pendidikan Karakter



Sumber : Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010)

2.6 Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sidang BPUPKI yang pertama, M.Yamin dalam usulannya menjelaskan tentang prinsip permusyawaratan, mufakat, dan kebijaksanaan dalam bernegara berasal dari nilai-nilai agama Islam. Ir. Soekarno dalam usulan dasar negara yang disampaikan secara lisan menyatakan prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan saja Bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi hendaknya masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan dan beribadah sesuai dengan kitab agamanya. Tiap-tiap orang dapat mengamalkan, menjalankan, dan menyembah Tuhannya secara leluasa dengan cara yang berkeadaban. Berkeadaban yang berarti hormat menghormati satu sama lain dan berbudi pekerti luhur (Risalah Sidang BPUPKI,1995) .

Sila pertama Ketuhan Yang Maha Esa dijabarkan dalam 7 butir pengamalan dari 36 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yaitu :

1. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan YME, sesuai dengan agama dan kepercayaannya sendiri-sendiri menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Bangsa Indonesia menyatakan ketakwaannya dan kepercayaannya terhadap Tuhan YME.
3. Mengembangkan sikap hormat dan menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME.
6. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
7. Mengembangkan sikap yang saling menghormati dan menghargai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Meskipun produk hukum ini tidak berlaku lagi dengan dicabut melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 karena dimanfaatkan penguasa untuk kepentingan politik, namun masih dapat dijadikan acuan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Kaelan (2013) menjelaskan dalam bukunya bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa jika dikaitkan dalam kehidupan bernegara, sama sekali bukan merupakan suatu prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadaban. Namun kemudian prinsip Ketuhanan ini menjadi landasan filosofis bagi sila-sila yang lain terutama dalam hal urusan publik warga negara dalam hubungan antar manusia. Sebagai contoh UU RI No.41 tentang wakaf pada domain kemasyarakatan dan kenegaraan. Sila pertama ini menjadi landasan berpijak yang paling utama dalam bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia. Sila kedua dengan prinsip adil dan beradab berlandaskan Ketuhanan, Persatuan yang berketuhanan, kepemimpinan dengan hikmah kebijaksanaan dengan sistem musyawarah yang berketuhanan, serta keadilan sosial yang berketuhanan. Jadi, kedudukan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjwai seluruh tata kehidupan bernegara.

Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa akan menjadi panduan dalam pelaksanaan hukum dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Al Qur'an menjelaskan ada dua jenis hubungan dalam kehidupan ini yaitu *hablumminallah* dan *hablum minannas*.

mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. (Q.S. Ali Imron : 112)

Hablumminallah yang berarti hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, dan *hablum minannas* dalam bentuk hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Adapun Nilai yang dimaksud adalah nilai yang terkait hubungan warga negara dengan negara dan warga negara dengan warga negara itu sendiri (*Hablumminannas*) yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa..

Secara histori jelas bahwa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dalam setiap gerak dan langkah Bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan merupakan nilai-nilai yang berasal dari agama yang berlandaskan kewahyuan. Artinya setiap warga negara Indonesia bertindak dan berperilaku dilandasi oleh nilai-nilai kewahyuan dari agama yang dianutnya. Hal ini telah banyak dilupakan oleh para pemimpin bangsa kita saat ini. Mulai muncul usaha pemisahan antara negara dengan agama. Agama seolah menjadi kerdil dan tak mampu untuk memberikan perubahan kepada bangsa ini. Kita bisa menyaksikan betapa banyak perilaku aparat pemerintah yang jauh dari nilai Ketuhanan. Tidak mungkin akan terjadi perilaku menyimpang, korupsi, dan manipulasi jika ia meyakini adanya Tuhan yang selalu mengawasi setiap prilakunya dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

Progran Santri Siap Guna merupakan program pendidikan karakter yang berlandaskan nilai ketauhidan. Santri yang ikut dalam program ini diharapkan dapat menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aktifitasnya dengan berpedoman pada moto Daarut Tauhiid untuk menjadikan manusia yang ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Karakter yang muncul adalah merupakan karakter yang dituntun oleh nilai-nilai kewahyuan. Setiap langkah adalah dzikir dalam rangka ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pantang untuk berbuat sia-sia. Sebelumnya telah ada model pendidikan karakter berupa pengembangan konsep *Personal Prophetic Leadership (Perpec-L)* sebagai model pendidikan karakter bersifat intrinsik yang dapat mengatasi perilaku korupsi. *Perpec-L* berdasar pada kesadaran rohaniah (intrinsik) manusia secara otonom yang diperoleh dari *taqarrub* (pendekatan pada Tuhan-Allah) dan *ittiba'* (meneladani) nilai kepemimpinan Nabi Muhammad yang terintegrasi dalam struktur kepribadian. Terdapat lima karakter intrinsik dari *Perpec-L*, yaitu hidup berdasar iman, berkarya dengan orientasi ibadah (visi dan misi), memiliki empat sifat Nabi (*amanah, tabligh, shiddiq dan fathanah*), humanis, dan memimpin berdasar suara hati. Kehadiran *Perpec-L* sebagai alternatif pendidikan karakter yang bersifat intrinsik sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah bangsa dan menata kembali kehidupan bangsa yang lebih baik (Mansyur, 2013, hlm. 18).

Hal tersebut sangat sejalan dengan misi PKn untuk menciptakan manusia yang baik dan cerdas. Al Muchtar (2016) menyatakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang mempunyai nilai religius (keagamaan) yang tinggi. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi jalan solusi atas permasalahan bangsa saat ini, mengingat Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan agamis.

2.7 PKn berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Pembukaan UUD 1945 alenia keempat memuat tujuan nasional yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 negara mengamanatkan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Winataputra (2012, hlm. 19) menyatakan bahwa “Kedua normatif konstitusional tersebut mengisyaratkan perlunya Pendidikan Kewarganegaraan yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bersatu, sejahtera, dan adil dalam konteks kehidupan masyarakat dunia yang damai”.

Ditambah lagi dalam SK Dirjen DIKTI Nomor 25/DIKTI/KEP/1985 Pendidikan Pancasila memiliki misi peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan jiwa Pancasila, pengembangan wawasan sejarah perjuangan bangsa, pengembangan wawasan komprehensif dan integratif, dan pengembangan wawasan budaya tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih jelas ditegaskan dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait Pendidikan Kewarganegaraan dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari semua penjelasan di atas jelas bahwa pendidikan nasional dan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya mempunyai tujuan utama menjadikan warga negara Indonesia menjadi warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab . Hal ini sejalan dengan apa yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung dalam program SSG yaitu menjadi santri yang mempunyai karakter Baik dan Kuat yang bersumber pada nilai ketauhidan. Karakter baik dalam wujud ikhlas, jujur dan tawadhu serta karakter kuat dalam wujud disiplin, berani dan tangguh.

Mengutip pendapat Ardiwinata, dkk. (2016, hlm 55) dalam jurnal penelitiannya bahwa diklat SSG merupakan model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda, yang selanjutnya dapat disebarluaskan dan menjadi bagi kelembagaan diklat, serta sebagai salah satu temuan teknologi (*sosial engenering*) bidang pelatihan yang secara makro dapat menjadi instrumen dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud ialah nilai yang muncul terkait hubungan antara warga negara dengan negara dan hubungan warga negara dengan warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pendidikan karakter sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun, pendidikan karakter yang ada sebelumnya lebih banyak di teliti pada pendidikan formal berupa Pembelajaran di kelas dan Ekstrakurikuler. Berikut akan disajikan penelitian terdahulu mengenai pendidikan karakter.

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Yulianawati Rukmana (2014) dengan judul “Implementasi Pembinaan Karakter melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) untuk Memantapkan Jati Diri Siswa sebagai Warga Negara yang Baik (Studi Kasus Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Negeri 18 Jakarta ditinjau dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)”.

Penelitian ini beranjak dari kerisauan terhadap krisis jati diri yang melanda para pelajar sebagai generasi muda harapan bangsa yang tidak menunjukkan sikap sebagai warga negara yang baik. Perilaku mereka yang banyak meniru budaya luar yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini mengkaji upaya memantapkan jati diri siswa sebagai warga negara yang baik dalam pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler rohis.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di SMP Negeri 18 Jakarta. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Persepsi warga sekolah tentang kegiatan ekstrakurikuler rohis sangat positif, karena dapat membantu para siswa menjadi manusia yang religius, jujur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Bentuk pembinaan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler rohis dengan diadakan latihan dasar kepemimpinan, adanya pengajian rutin, dan program baca tulis Alqur’an; (3) hambatan pembinaan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler rohis yaitu dana operasional kegiatan yang sering terlambat, fasilitas yang pas-pasan, sarana masih kurang, peralatan masih perlu dilengkapi, masih perlu penambahan pengetahuan dan keterampilan pembina dan pelatih, kurangnya dorongan dan dukungan orang tua bagi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler; (4) untuk mengatasi hambatan yaitu dengan terus menerus pembinaan siswa secara berkelanjutan, adanya bimbingan siswa melalui sosialisasi ulang baik dari pihak sekolah maupun orang tua. Rekomendasi dari penelitian tersebut adalah bagi pihak sekolah terutama untuk kepala sekolah SMP Negeri 18 Jakarta yakni perekrutan tenaga pembina atau pelatih ekstrakurikuler harus benar-benar selektif agar menghasilkan yang terbaik, dan tidak ada istilah pemerataan guru untuk mengelola ekstrakurikuler, hanya mereka yang benar-

benar memiliki latar belakang dan kemampuan dimasing-masing bidang yang dapat menjadi pembina dan pelatih.

2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Suparno (2015) dengan judul “Peran Nilai-Nilai Relijius Kerajaan Sintang dalam Membina Karakter Generasi Muda (Studi Fenomenologi pada Masyarakat di Pulau Perigi Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan karakter pada generasi muda. Karakter yang baik merupakan suatu cerminan bahwa seseorang dapat berperilaku yang baik. Kenyataannya saat sekarang ini banyak terjadi perilaku generasi muda khususnya di Sintang yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Perilaku negatif generasi muda tersebut mencerminkan adanya karakter yang tidak baik, hal ini menjadikan warga negara yang baik (*good citizenship*) tidak akan terwujud. Di Sintang terdapat Kerajaan Islam yang saat ini peranan nilai-nilai religius masih di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menanggapi permasalahan terhadap generasi muda, Kerajaan Sintang memiliki peranan dalam melakukan pembinaan karakter generasi muda. Pembinaan ini merupakan salah satu upaya pendidikan yang dilakukan di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian yang penulis peroleh yaitu *pertama* Filosofi dan latar belakang nilai-nilai religius kerajaan Sintang sekarang mengadaptasi dari nilai-nilai yang diterapkan oleh Kerajaan Sintang dahulu dan masih dilestarikan hingga saat ini. *Kedua* Implementasi nilai-nilai religius Kerajaan Sintang dalam membina karakter generasi muda sebagai bentuk dari pembangunan berkelanjutan berbentuk dua kegiatan yaitu kegiatan situs keagamaan dan seni tari bernafaskan Islam. Rekomendasi dari penelitian ini untuk perguruan tinggi khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat mata kuliah hukum Islam sangat relevan untuk studi lapangan di kerajaan Sintang. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti peran pemerintah dalam mengoptimalkan pendidikan kemasyarakatan untuk membentuk karakter pemuda.

3. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Yayan Budi Sofyan (2014) yang berjudul “Pendidikan Karakter dalam Upaya Penanggulangan Tawuran antar Pelajar di SMK Swasta (Studi Kasus pada 3 SMK Swasta di Kabupaten Purwakarta)”.

Penelitian ini didasari oleh maraknya tawuran antar pelajar khususnya di Purwakarta yang banyak merugikan masyarakat umum serta pelaku tawuran itu sendiri, namun hal tersebut tidak menjadikan pelajar tersebut jera. Sehingga Bupati di Kabupaten Purwakarta ini mengeluarkan sanksi tegas untuk sekolah-sekolah yang terlibat berupa pelarangan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2014-2015 bagi 6 SMK swasta di Purwakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, *pertama* tawuran antar pelajar SMK disebabkan adanya saling ejek antar siswa, kuatnya rasa solidaritas antar kawan, adanya dendam turunan, kondisi remaja yang mudah terprovokasi, kuatnya kecintaan terhadap almamater, saling ejek antar sekolah yang membudaya, pemalakan serta dominasi pengaruh teman sebaya terhadap perilaku negatif siswa; *Kedua* program dalam mengatasi tawuran antar pelajar SMK di Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui program kurikuler, program ekstrakurikuler dan program sekolah; *Ketiga* nilai yang dikembangkan dalam meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar meliputi nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, ketekunan, kerja keras, disiplin, nilai gotong royong dan tanggung jawab; *Keempat* hambatan yang ditemui terbagi menjadi hambatan internal (emosi siswa masih labil, masih terpeliharanya kebiasaan saling ejek antar siswa, dan rendahnya minat belajar siswa) dan hambatan eksternal (sulitnya memutus mata rantai alumni dan senior yang secara masif menularkan informasi-informasi negatif, sulitnya mengajak seluruh elemen pendidik untuk melaksanakan pendidikan karakter serta sulitnya membangun komunikasi dengan orang tua dan aparat kepolisian. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk *mindset* siswa terhadap realitas nilai, kemudian dilakukan tindakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan kemudian menjadi karakter yang semua itu dilaksanakan secara terus menerus serta dengan memperkuat fungsi PKn dalam mengembangkan kompetensi warga negara. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi perlunya meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keseharian siswa

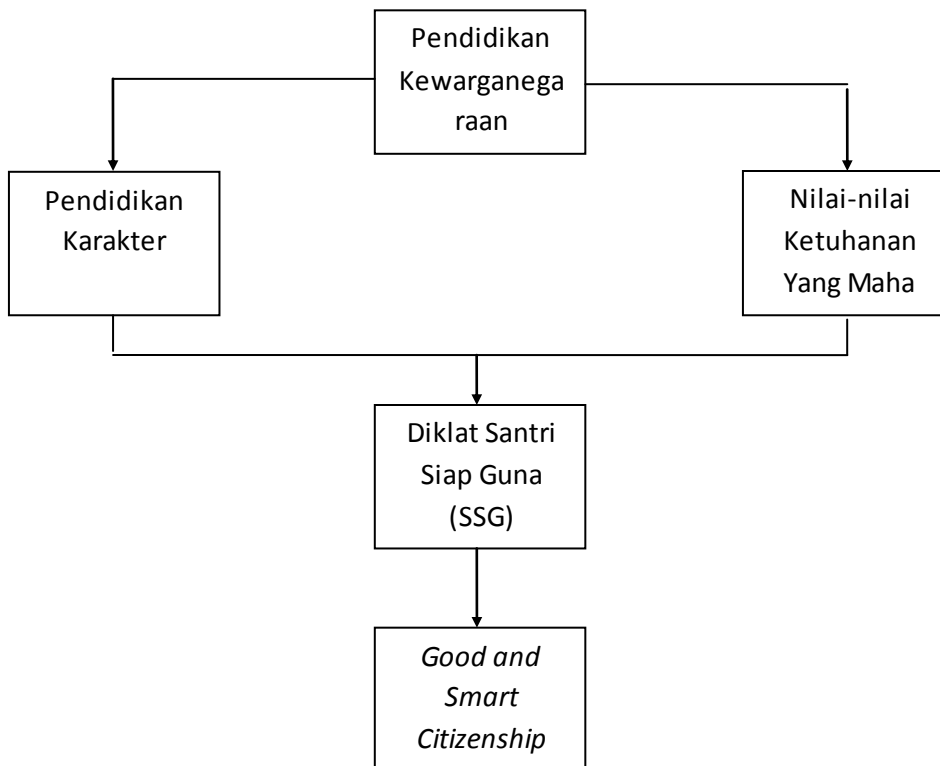
ketika berada di sekolah, perlu dirancang program sekolah yang secara spesifik bertujuan mencegah tawuran antar pelajar SMK, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, perlu pengembangan pembelajaran yang terintegrasi dengan muatan pendidikan anti tawuran, perlunya orang tua meningkatkan jalinan komunikasi dengan sekolah dalam menumbuhkembangkan karakter baik (*good character*), peningkatan kuantitas razia bagi siswa oleh Polisi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Koswara (2012) tentang Proses Pembelajaran Karakter Berbasis Akhlak Islam bagi Upaya Penguatan Kepribadian Santri (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Modern Bandung). Menghasilkan temuan :

1. Integrasi pendidikan karakter dalam program kurikuler santri di lingkungan pondok pesantren Al-Basyariah menggunakan pendekatan holistik di mana kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah kesatuan dalam totalitas kehidupan sehari-hari. Proses pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, kegiatan kurikuler serta kerjasama dengan pihak keluarga dan masyarakat
2. Proses pembelajaran karakter berbasis akhlak Islam dalam program ekstrakurikuler santri di lingkungan Pondok Pesantren Al-Basyariah menggunakan kebiasaan kreatif, di mana kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah keterpaduan dalam totalitas kehidupan sehari-hari. Adapun proses pembinaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, melalui pembiasaan kegiatan ekstrakurikuler serta kerjasama yang sinergis.

2.9 Paradigma Penelitian

Bagan 1.3
Paradigma Berfikir



Sumber : *dikembangkan oleh peneliti, 2016*

Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan erat dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan dalam rangka pembentukan warga negara yang memiliki watak, tabiat, akhlak dan budi pekerti yang baik. Pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan intinya agar terwujud warga negara yang baik dan cerdas. Peneliti meyakini bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya pendekatan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila yang merupakan unsur utama bagi sila-sila yang lain. Hal tersebut teraktualisasikan pada pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk program Santri Siap Guna yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung. Dari program tersebut peneliti meyakini akan terbentuk warga negara yang baik dan cerdas yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.